



PPMAY SAMPAIKAN BEBERAPA PERSOALAN

Kawal Penataan Malioboro

Penataan Malioboro menjadi kawasan semipedestrian tak semudah membalikkan tangan.

Pimpinan dan anggota DPRD DIY sepakat mengawal penataan tersebut.

ITU mengingat masih terjadi tarik ulur berbagai kepentingan yang harus diselesaikan. Menyikapi itu, DPRD DIY untuk kali kesekian mengundang para pemilik toko di kawasan Malioboro yang di Per-kumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY).

Perwakilan PPMAY diterima langsung Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Lak-sana. Pertemuan diikuti perwakilan Bappeda DIY, Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Ada juga dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kami belum mengetahui mau dibawa ke mana Malioboro ini?" tanya Sadana.

Jika nantinya kendaraan bermotor dilarang lewat Malioboro dikhawatirkan membuat wisatawan enggan belanja. Alasannya susah mencari tempat parkir. Dia berharap kendaraan roda dua dan empat tetap bisa masuk Malioboro.

"Untuk itu pemerintah perlu menyediakan tempat parkir yang memadai," harap Sadana.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Yogyakarta belum memberikan gambaran pasti. Kenyataannya Malioboro sekarang bukan lagi ramai pengunjung. Tapi pedagang kaki lima (PKL), "jumlahnya mencapai 1.200 pedagang," beber pemilik Mal Ramai ini.

Sadana menegaskan bukan tidak menghen-daki PKL. Namun PPMAY ingin mereka juga tertib. Sebab, selama ini seakan-akan toko-toko di Malioboro milik mereka.

Ketua I PPMAY Sodikin menyatakan se-rupa. Penataan Malioboro sangat pelik. Jumlah toko dengan PKL tidak seimbang. "jumlah toko sekitar 200-an sedangkan PKL 1.200," ungkapnya.



SEMI PEDESTRIAN:
Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Lak-sana didampingi Rany Widayati memimpin pertemuan dengan Per-kumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY).

Sodikin mengakui kondisi Malioboro se-karang berbeda. Tidak seperti dulu lagi. "To-kol dikawatirkan. Tanah yang dipinjam pem-erintah untuk pejalan kaki, faktanya sudah berubah fungsi," ungkap dia.

Tanah tersebut dipakai PKL. Jika dianalogikan toko adalah rumah. Maka tanah yang dipakai PKL merupakan teras rumah. "Kalau fungsinya seperti dulu kami enjoy dan happy," ucap Sodikin.

Dari pengamatannya, sebagian PKL Ma-lioboro tidak layak disebut PKL. Lebih pas disebut pengusaha. Di antara mereka ada yang memiliki empat sampai lima outlet. Bahkan ada yang punya 20 outlet.

Bila dibiarkan, dia khawatir rawan melahir-kan potensi konflik. Itu mengingat tanah ter-sebut milik toko. Pemiliknya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Faktanya tanah itu tidak lagi dimiliki pihak pertama. Tapi jatuh ke orang lain.

Sodikin meminta DPRD DIY ikut mendorong penataan PKL. Pertimbangannya jumlahnya sudah tidak proporsional. Yakni 1 banding 6.

Di setuju PKL dijadikan pengusaha formal. Status mereka akan terangkat.

"Kami mohon, teman-teman PKL itu di-luaskan. Jadikan mereka pengusaha formal. Pemerintah wajib memfasilitasi dan me-nyejahterakan dengan menyediakan tem-pat berjualan yang masih berada di sekitar Malioboro," ungkap Sodikin.

Penilik toko Sepatu Villa Yulianto, meng-atakan tak pernah diajak bicara terkait pe-nataan Malioboro. "Kami tiba-tiba dikum-pulkan ketika proyek hendak dimulai," keluhnya.

Di luar itu, Malioboro kekurangan hidran. Padahal fungsinya sangat penting jika ter-jadi kebakaran. Malioboro juga tidak ramah difabel. Dari 17 zebra cross, dari Pasar Kem-bang sampai Mirota Batik, hanya terdapat tiga atau empat jalur ramah difabel. Khu-susnya pengguna kursi roda.

Sulham dari Batik Asia menambahkan belum pernah diajak bicara mengenai pe-destrian Malioboro. Dia ingin pemerintah mengakui tanah itu milik toko. (had)

<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

- **Din. Pariwisata**
 - **UPT. Malioboro**
 - **Din. PUPKP**

Yogyakarta,
 Pjt. Kepala
 Sekretaris
 Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005